



Judul : Setumpuk Pekerjaan Rumah Menanti Lodewijk
Tanggal : Kamis, 30 September 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

WAKIL KETUA DPR

Setumpuk Pekerjaan Rumah Menanti Lodewijk

JAKARTA, KOMPAS — Kabar penunjukan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus untuk mengisi posisi Wakil Ketua DPR dari Golkar yang ditinggalkan Azis Syamsuddin terkonfirmasi setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkannya pada Rabu (29/9/2021). Setelah namanya diserahkan Airlangga ke DPR, Lodewijk akan di-sahkan menjadi Wakil Ketua DPR dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (30/9) ini. Setumpuk pekerjaan rumah menanti mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu. Salah satunya, memulihkan kepercayaan publik kepada DPR.

Pengumuman nama Lodewijk disampaikan Airlangga dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta. Pengumuman disampaikan setelah Airlangga menyerahkan nama Lodewijk beserta surat permohonan pengunduran diri Azis dari jabatan Wakil Ketua DPR kepada Ketua DPR Puan Maharani. Azis mengundurkan diri setelah ditahan dan ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap bekas penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, akhir pekan lalu.

Menurut Puan, yang hadir saat jumpa pers, rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR pada Selasa (28/9) telah memutuskan pergantian antarwaktu pimpinan DPR dari Golkar akan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis ini.

Selain Puan dan Airlangga, hadir pula saat jumpa pers Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Fraksi Golkar di DPR Kahar Muzakir, Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Adies Kadir, beserta Ketua Fraksi PDI-P di DPR Utut Adianto. Adapun Lodewijk tak terlihat.

Lodewijk mulai meniti karier politik pada 2013 dengan bergabung bersama Golkar. Awalnya, ia menjabat salah satu ketua di DPP Golkar sebelum dipercaya menjabat Sekjen Golkar mulai awal 2018. Pada Pemilu 2019, Lodewijk terpilih menjadi ang-

Kita berharap Lodewijk benar-benar berintegritas sehingga kasus korupsi yang sudah menjerat tiga unsur pimpinan DPR tidak terulang kembali

Lucius Karus

gota DPR dari Lampung dan selanjutnya ditugaskan di Komisi I DPR hingga kini. Sebelum terjun di dunia politik, ia lama berkarier di TNI dengan pangkat terakhir letnan jenderal.

Airlangga mengatakan, penunjukan Lodewijk telah dibahas dalam sidang harian terbatas dan sidang pleno DPP Golkar. Penunjukannya juga telah dikomunikasikan kepada senior-senior Golkar, yakni Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung, dan Penasihat DPP Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.

Alasan memilih Lodewijk adalah ia merupakan tokoh senior dan orang nomor dua di Golkar karena posisinya sebagai sekjen partai. "Tentu kami berharap proses pengajuan calon wakil ketua DPR dari Partai Golkar ini bisa diselesaikan dan disampaikan dalam rapat paripurna dan berproses sesuai mekanisme yang ada di DPR," ujar Menteri Koordinator Bidang Perencanaan itu.

Kondusivitas terjaga

Penunjukan Lodewijk, menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, sudah tepat untuk menjaga kondusivitas internal Golkar. Formappi berharap Lodewijk bisa memberikan warna perubahan bagi DPR, terutama terkait penegakan nilai-nilai integritas dalam kinerja DPR. Kendati demikian, ia melihat penunjukan itu belum sepenuhnya memperha-

tikan aspek uji kepatutan, misalnya dengan penelusuran rekam jejak atau pemeriksaan etik di tataran internal partai.

"Dengan tidak adanya perubahan model penunjukan oleh partai, tak banyak harapan dari figur yang dipilih partai. Kita lagi-lagi hanya bisa berharap Lodewijk benar-benar berintegritas sehingga kasus korupsi yang sudah menjerat tiga unsur pimpinan DPR, yang dua di antaranya berasal dari Partai Golkar, tidak terulang kembali," katanya.

Untuk itu, Lodewijk diminta memastikan keterbukaan dan akuntabilitas saat memimpin. Keterbukaan dan akuntabilitas penting untuk mencegah pimpinan DPR kembali terjebak pada rayuan penyalahgunaan kekuasaan.

Kepercayaan publik

Adapun peneliti Indonesia Parliamentary Center (IPC), Muhammad Ichsan, mengingatkan, posisi Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan yang akan dijabat Lodewijk sangat strategis mengingat ia menjadi koordinator sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) yang strategis, seperti Badan Legislasi DPR, Komisi I DPR, Komisi II DPR, dan Komisi III DPR.

Selain itu, Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan juga menjadi Ketua Tim Reformasi Parlemen dan Tim Open Parlemen Indonesia (OPD) yang bertanggung jawab atas reformasi kelembagaan serta membangun keterbukaan DPR melalui *e-parliament*.

IPC menilai perlu adanya keseriusan dalam membangun keterbukaan di DPR. Begitu pula membangun ulang kepercayaan publik kepada DPR melalui peningkatan akses partisipasi publik yang telah menjadi Rencana Aksi OPI 2018-2020 dan 2020-2022.

Keterbukaan itu salah satunya dalam proses penegakan kode etik yang dinilai belum terbuka. "DPR perlu meningkatkan akuntabilitas serta keterbukaan terhadap pengaduan etik anggota DPR yang disampaikan melalui Mahkamah Kehormatan Dewan," ucapnya. (REK/SYA)